

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Yasyrif Watampone. Jakarta.
- A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Makassar.
- Burhan Ashshoraf. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Djaja S.Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung.
- Istijab. *Krimnologi*. C.V Penerbit Qiara Media. Pasuruan.
- Amiruddin dan Zinal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng. 2018. *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Trussmedia Grafika. Yogyakarta.
- Nurul Qamar. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV.Sosial Politicals Genius (SIGn). Makassar.
- Romli Atmasasmita. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Refika Adimata. Bandung.
- R.Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar*. Politeia. Bogor.
- , 1985. *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. PT. Karya Nusantara. Bandung.
- Soedjono. R. 1975. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT.Raja Grafindo Prasada. Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.

Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. PT Buku Seru. Jakarta.

Skripsi

Reina. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan kepada Debitur*. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.

Varhan Herman. 2019. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar.

Jurnal

Mahenderi Massie 2017. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. Lex Crime. Vol.VI, Nomor.7 September 2017.

Koran Online

<https://polrestabesmakassar.com/blog/waspada-master-tipu-gelap-gadai-kendaraan-diamankan-resmob-mamajang.html> di akses pada 21 Januari 2020 (Koran online).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wawancara

Andi Marini, 2021, Wawancara, Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, Sul-sel, 11 Juni 2021.

Sudarmin, Wawancara, Polrestabes Makassar, Sul-sel, 23 Mei 2021.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-383
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

11 Juni 2021

Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar
di
Makassar

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor: 4482/UN4.5.3/PT.00/2021 tanggal 4 Juni 2021 hal Penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut:

Nama : Ruhaimah
NIM : B011171083
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020)" yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni sampai dengan 14 Juli 2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin
NIP. 19621231 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasayarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.